

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Usaha mikro kecil menengah merupakan sektor usaha ekonomi kerakyatan yang tangguh. Hal ini dibuktikan ketika terjadi krisis ekonomi pada tahun 1998, sektor usaha mikro kecil menengah ini masih mampu bertahan dari terpaan krisis ekonomi yang melanda Indonesia. Hal ini dikarenakan usaha kecil ini mampu dimiliki masyarakat perkotaan maupun pedesaan dengan beragam jenis usaha. Selain itu keunggulan yang dimiliki sektor ini adalah mampu melibatkan banyak tenaga kerja, karena seperti apa yang kita ketahui bahwa usaha dan proses produksi dalam sektor ini masih dilakukan secara manual atau minim akan bantuan teknologi mesin. Dengan banyaknya orang yang terlibat dalam usaha tersebut, berarti sejalan dengan indikator utama pemberdayaan, yaitu melibatkan seluas-luasnya anggota masyarakat terlibat langsung dalam pembangunan.

Saat Indonesia mengalami krisis ekonomi, sektor UMKM mampu menghadapi terpaan ekonomi dan tidak mengalami keterpurukan. Hal ini disebabkan oleh beberapa alasan yaitu sebagian besar usaha kecil menghasilkan barang-barang konsumsi, khususnya yang tidak tahan lama. Kelompok barang ini dicirikan oleh permintaan terhadap perubahan pendapatan yang relatif rendah. Artinya, seandainya terjadi peningkatan pendapatan masyarakat, permintaan atas kelompok ini tidak akan

meningkat banyak, sebaliknya jika pendapatan masyarakat merosot sebagai akibat dari krisis maka permintaan tidak akan banyak berkurang. Dengan demikian, secara rata-rata tingkat kemunduran usaha kecil tidak separah yang dialami oleh kebanyakan usaha besar, terutama usaha yang selama ini bisa bertahan karena topangan proteksi, fasilitas istimewa, dan praktik KKN lainnya.¹

Seperti apa yang telah diketahui bahwa sejak krisis moneter yang terjadi pada pertengahan tahun 1997 dan telah berkembang menjadi krisis ekonomi dan multidimensi, pertumbuhan ekonomi nasional relatif masih rendah, yang mengakibatkan masalah-masalah sosial mendasar yang belum terpecahkan. Permasalahan utama yang dihadapi adalah meningkatnya pengangguran dan kemiskinan. Pada 2004, jumlah pengangguran terbuka mencapai 9,5 juta jiwa dan setiap tahunnya jumlah angkatan kerja baru bertambah sekitar 2,5 juta hingga pada tahun 2006 jumlah pengangguran mencapai 10,9 juta orang. Demikian juga halnya dengan masalah kemiskinan, jumlah penduduk miskin pada 2004 sekitar 36,1 juta jiwa dan telah bertambah menjadi 39,05 juta pada tahun 2006.²

Permasalahan pengangguran dan kemiskinan harus dikurangi secara bertahap dengan tujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur seperti apa yang terkandung dalam UUD 1945. Oleh karena itu, agenda prioritas pembangunan nasional ditujukan untuk menciptakan Indonesia yang aman dan damai, mewujudkan

¹Faisal Basri, 2002, *Perekonomian Indonesia Tantangan dan Harapan Bagi Kebangkitan Ekonomi Indonesia*, Jakarta: Erlangga, Hal. 210.

²Mukti Fajar, 2016, *UMKM di Indonesia Perspektif Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Hal. 221-222.

Indonesia yang adil dan demokratis, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka proses pembangunan ke depan diarahkan pada upaya pemberdayaan masyarakat secara luas yang berdasarkan pada semangat kerakyatan, kemartabatan dan kemandirian.

Kontribusi sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terhadap produk domestik bruto (PDB) ini semakin menggeliat dalam lima tahun terakhir. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) mencatat kontribusi sektor UMKM meningkat dari 57,84 persen menjadi 60,34 persen. Tak hanya itu, sektor UMKM juga telah membantu penyerapan tenaga kerja di dalam negeri. Serapan tenaga kerja pada sektor UMKM tumbuh dari 96,99 persen menjadi 97,22 persen dalam periode lima tahun terakhir.³

Sebagai bagian integral dari dunia usaha, UMKM merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional berlandaskan demokrasi ekonomi. Selain dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Usaha Swasta Besar (USB). Nilai investasi dari UMKM juga mempunyai jumlah yang perlu diperhitungkan dalam ekonomi nasional. Besaran investasi fisik UMKM seperti apa yang dinyatakan dengan angka Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) pada 2007 sebesar Rp 462,0 triliun atau 47 persen dari total PMTB Indonesia, lebih besar dari tahun sebelumnya

³Di akses di <http://www.kemenperin.go.id/artikel/14200/Kontribusi-UMKM-Naik> pada tanggal 20 Mei 2017

yaitu sebesar 46 persen. Peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan investasi Usaha Menengah dari 25,6 persen di tahun 2006 menjadi 26,1 persen di tahun 2007 dan juga peningkatan investasi Usaha Kecil dari 20,5 persen di tahun 2006 menjadi 20,8 persen di tahun 2007.⁴

Sektor UKM, yang bergerak dalam berbagai horison kegiatan ekonomi, terutama bidang manufaktur, sudah lama dinilai sebagai sektor terpenting dalam mengikis masalah gawat yang dihadapi Indonesia, yakni pengangguran dan setengah pengangguran. Karena itu, pengembangan sektor yang tersebar di seluruh negeri, khususnya di pedesaan, dinilai sangat baik dan strategis tidak saja untuk memperbesar lapangan kerja dan kesempatan usaha, tetapi sekaligus pula mendorong pembangunan daerah dan kawasan pedesaan di Indonesia.⁵

Sedangkan peran UMKM dalam pembangunan nasional merupakan suatu realitas yang tidak dapat dipungkiri lagi bahwa UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) adalah sektor ekonomi nasional yang menyangkut hidup orang banyak, sehingga dapat dikatakan bahwa UMKM menjadi roda penggerak perekonomian nasional. Sektor UMKM ini juga memiliki peran sebagai kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam kegiatan perekonomian di Indonesia karena memang telah terbukti menjadi pengaman perekonomian nasional dalam masa krisis ekonomi serta menjadi dinamisator pertumbuhan ekonomi pasca krisis, maka dari itu perlu diupayakan

⁴*Ibid*, Hal. 239.

⁵Haryono Suyono, 2006, *Pemberdayaan Masyarakat: Mengantar Manusia Mandiri, Demokratis dan Berbudaya*, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, Hal. 238-239.

pemberdayaan pada UMKM agar sektor tersebut mampu bertahan karena melihat kemampuannya dalam menghadapi krisis ekonomi yang pernah melanda Indonesia.

Sebagai salah satu kabupaten di Jawa Tengah, dapat dikatakan bahwa Kabupaten Kudus merupakan Kabupaten terkecil di daerah industri dan perdagangan yang mampu menyerap tenaga kerja dan memberikan kontribusi besar terhadap PDRB. Sektor industri pengolahan berperan amat dominan dalam perekonomian Kabupaten Kudus. Sektor industri merupakan tiang penyangga utama dari perekonomian Kabupaten Kudus dengan kontribusi sebesar 81,09 persen terhadap PDRB Kabupaten Kudus pada tahun 2016.⁶ Berikut ini adalah tabel presentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kudus pada tahun 2012-2016.

⁶Badan Pusat Statistik: Kabupaten Kudus dalam Angka Tahun 2016

Tabel 1.1
Presentase PDRB Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Kudus
Tahun 2012-2016

	Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015*	2016**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2,43	2,39	2,30	2,39	2,36
B	Pertambangan dan Penggalian	0,11	0,10	0,11	0,12	0,12
C	Industri Pengolahan	81,86	81,76	81,94	81,44	81,06
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
F	Konstruksi	3,11	3,07	3,09	3,16	3,27
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,24	5,35	5,21	5,30	5,37
H	Transportasi dan Pergudangan	0,94	0,93	0,97	1,02	1,02
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,02	1,05	1,07	1,12	1,15
J	Informasi dan Komunikasi	0,54	0,52	0,52	0,52	0,54
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,63	1,66	1,63	1,69	1,78
L	Real Estate	0,51	0,50	0,51	0,52	0,53
M,N	Jasa Perusahaan	0,09	0,09	0,09	0,09	0,10
O	Adm. Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,83	0,80	0,77	0,78	0,78
P	Jasa Pendidikan	0,90	0,95	0,97	0,99	1,03
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,27	0,27	0,28	0,29	0,30
R,S,T,U	Jasa Lainnya	0,47	0,48	0,49	0,49	0,52
Produk Domestik Regional Bruto		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Sumber: Kabupaten Kudus dalam Angka Tahun 2016

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa industri pengolahan mempunyai kontribusi yang cukup besar terhadap PDRB Kabupaten Kudus. Industri pengolahan ini bermacam-macam jenisnya seperti industri tembakau, makanan dan minuman serta pakaian. Selanjutnya berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Tenaga Kerja Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kudus pada tahun 2015 menyatakan 12.957 unit perusahaan industri/unit usaha di Kabupaten Kudus. Angka tersebut mencakup seluruh perusahaan (unit usaha) industri baik yang besar/ sedang ataupun industri kecil/ rumah tangga. Bila dibandingkan tahun 2014 terjadi peningkatan jumlah unit usaha industri sebesar 0,15 persen. Menurut data dari Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM kabupaten Kudus, terdapat sekitar 13.700 pelaku UMKM pada tahun 2016. Jumlah ini diperkirakan akan terus mengalami peningkatan di setiap tahunnya.

Tabel 1.2
Banyaknya Seluruh Perusahaan Industri dan Nilai Produksi di
Kabupaten Kudus Tahun 2014-2015

No.	Kecamatan	2014		2015	
		Perusahaan/Unit Usaha	Tenaga Kerja	Perusahaan/Unit Usaha	Tenaga Kerja
1	Kaliwungu	1848	13477	1851	13515
2	Kota	2180	138585	2182	138689
3	Jati	1591	28046	1593	28126
4	Undaan	477	2049	478	2054
5	Mejobo	1822	4652	1825	4688
6	Jekulo	1076	5574	1078	5607
7	Bae	1283	30861	1285	30929
8	Gebog	1249	20426	1252	20503
9	Dawe	1412	6399	1413	6406
Jumlah		12938	250039	12957	250517

Sumber : Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kudus Tahun 2017

Secara geografis, letak Kabupaten Kudus cukup strategis, karena berada di jalur perlintasan ekonomi antar provinsi sehingga menjadikan kota ini sebagai sentra perdagangan nasional yang memiliki mobilitas tinggi. Kota Kudus terkenal sebagai industri rokok atau kretek terbesar di Indonesia. Industri yang telah dijalani berpuluh tahun tersebut menawarkan banyak sekali manfaat, sebagai contoh adalah lapangan pekerjaan yang terbuka untuk para penduduk di Kabupaten Kudus. Namun dapat dilihat bahwa saat ini sentra UMKM di Kabupaten Kudus juga terus berkembang beriringan dan tidak kalah dengan industri rokok. Pergerakan kemajuan UMKM ini mulai dari berbagai produk seperti bordir, batik, tas, pisau, gebyok dan makanan minuman seperti jenang hingga kopi tapak muria.

Berdasarkan delapan misi Kabupaten Kudus, terdapat dua misi yang terkait langsung dengan bidang tugas Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kudus yaitu Misi I : Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan Misi ke 4 : Perlindungan usaha dan kesempatan kerja secara luas dan menyeluruh.

Dalam mendukung terlaksananya misi tersebut, dinas terkait menjabarkan kedalam tugas pokok dan fungsinya dengan menyelenggarakan misi seperti meningkatkan pelayanan informasi penempatan dan pembinaan ketenagakerjaan yang murah, mudah dan cepat; memberdayakan usaha mikro, kecil dan menengah/industri kecil menengah dan koperasi menuju kemandirian dan berdaya saing; dan mendorong pertumbuhan dan penguatan ekonomi daerah melalui perlindungan usaha dan kesempatan kerja yang luas. Pemberdayaan ekonomi rakyat melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor produktif Koperasi dan UMKM menjadi prioritas, mengingat peran yang sangat besar bagi penyerapan tenaga kerja dengan sasaran peningkatan kapasitas kelembagaan, permodalan dan sumber daya manusi pelaku usaha mikro kecil dan menengah serta akses pasar produk UMKM. Dengan pemberdayaan UMKM dan Koperasi maka perekonomian akan semakin tumbuh.

Sebagai salah satu roda penggerak perekonomian maka perlu dilakukan pemberdayaan pada sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah tersebut. Sedangkan menurut UU No. 20 Tahun 2008 pemberdayaan UMKM ini perlu dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang,

berkembang, dan berkeadilan; menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; serta meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Dari beberapa desa yang ada di Kabupaten Kudus, Desa Loram yang dibagi mejadi Loram Wetan dan Loram Kulon ini juga sangat dikenal. Pasalnya, dua desa ini merupakan sentra usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Berbagai *home industry* berada disini. Mulai dari usaha pembuatan makanan, sabuk, tas, konveksi hingga pengumpulan barang rosok. Kebanyakan warga kedua desa ini memang lebih senang berwiraswasta daripada menjadi buruh di pabrik. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kudus, di Desa Loram Wetan terdapat sekitar 170 pelaku UMKM yang bergerak di berbagai bidang. Sementara di Desa Loram Kulon tak kurang 218 pelaku UMKM yang terdaftar pada dinas tersebut. Berbagai produk hasil dari UMKM yang ada di kedua desa tersebut mempunyai peluang yang sangat bagus untuk terus dikembangkan. Apalagi rata-rata sudah memiliki pasar dan pelanggan hingga level nasional.

Seperti apa yang telah dijelaskan bahwa UMKM memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, UMKM juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil

pembangunan. Peran yang sangat penting ini terlihat dari perspektif kesempatan kerja dan sumber pendapatan bagi kelompok miskin, distribusi pendapatan, pengurangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian.⁷

Mengingat hal tersebut sudah saatnya pemberdayaan masyarakat dalam ekonomi rakyat menjadi perhatian utama. Pemberdayaan masyarakat melalui UMKM ini banyak menghadapi permasalahan yaitu kesulitan terhadap permodalan dan terkait dengan pemasaran.⁸ Berbagai permasalahan dalam pemberdayaan UMKM adalah rendahnya kemampuan sumber daya manusia, terbatasnya penguasaan dan pemilikan asset produksi terutama permodalan, konsentrasi pekerjaan sumber daya yang bergerak pada usaha yang turun temurun, dan rendahnya penguasaan teknologi proses produksi dan informasi pemasaran. Melalui optimalisasi peranan beberapa lembaga pendamping untuk memperkuat peranan UMKM dan koperasi, penciptaan semangat kewirausahaan dan pengembangan pemasaran produk diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Mengingat hal tersebut maka pembangunan ekonomi harus menuju pada sistem ekonomi rakyat yaitu UMKM. Kedudukan dan posisi UMKM perlu ditingkatkan dan pemberdayaan UMKM sebagai sarana pengentasan kemiskinan merupakan salah satu alternatif yang harus segera dilakukan.

⁷Putriana, 2012, *Strategi Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)*, Riau: Jurnal UIN Sultan Syarif Kasim, Vol. 15 No. 2.

⁸Hasil wawancara dengan Ibu Mahmudah Widhyartati, SH selaku Kepala Seksi Pengembangan, Promosi, Produksi dan Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kudus.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melihat seberapa besar peran pemerintah Kabupaten Kudus dalam pemberdayaan UMKM di desa tersebut. Sehingga peneliti tertarik mengkaji permasalahan tersebut melalui penelitian yang berjudul “*Peran Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM dalam Pemberdayaan UMKM Sentra Tas di Desa Loram Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus*”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasidan UKM dalam pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah Sentra Tas di Desa Loram Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus ?
2. Bagaimana faktor penghambat dan pendukung dalam upaya pemberdayaan UMKM di Desa Loram Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peran Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UMKM dalam Pemberdayaan UMKM Sentra Tas di Desa Loram Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung dalam upaya pemberdayaan UMKM di Desa Loram Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi khasanah sumber pengetahuan serta keilmuan bagi masyarakat, terutama berkaitan dengan peran pemerintah dalam pemberdayaan UMKM.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperdalam pengetahuan peneliti tentang upaya yang dapat dilakukan dalam pemberdayaan UMKM karena dengan terciptanya pemberdayaan itu berarti dapat menciptakan kesejahteraan bagi kehidupan masyarakat.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam upaya pemberdayaan masyarakat khususnya pada sentra UMKM dimana pada dasarnya UMKM ini mempunyai dampak yang luar biasa bagi kegiatan perekonomian masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat membantu pemerintah dalam membuat kebijakan ataupun mengambil keputusan dalam upaya pemberdayaan masyarakat.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat membuat masyarakat memahami tentang manfaat yang diperoleh dari UMKM tersebut, selain itu juga diharapkan agar masyarakat menjadi lebih bersemangat dalam menjalankan usahanya.

1.5 Kerangka Teori

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Untuk menghasilkan sebuah penelitian yang komprehensif dan berkorelasi, dalam melakukan penelitian yang berjudul “Peran Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM dalam Pemberdayaan Sentra UMKM Tas di Desa Loram Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus” ini,

peneliti melakukan peninjauan terhadap penelitian yang telah dilakukan sebelumnya sebagai rujukan bahasan di dalam penelitian ini.

Berdasarkan penelitian terdahulu pada skripsi Universitas Diponegoro yang dilakukan oleh Sulistyono Ady Purnomo mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan tahun 2012 yang berjudul “*Analisis Implementasi Kebijakan Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Klaten Studi Pengecoran Logam di Kecamatan Ceper*”, dengan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pemberdayaan UMKM sektor pengecoran logam di Desa Batur Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten yang dilaksanakan oleh Diperindagkop dan UMKM Kabupaten Klaten dilakukan dalam dua tahap yaitu pemberian motivasi dan semangat, yang kedua yaitu pemberian bantuan sesuai kebutuhan. Secara umum implementasi kebijakan pemberdayaan UMKM sektor pengecoran logam di Kabupaten Klaten juga berjalan cukup baik hal ini dapat dilihat dari adanya komunikasi yang baik antara pemerintah dengan pelaku usaha cor logam.

1.5.2 Peran Birokrasi

Fungsi pokok birokrasi dalam negara adalah menjamin terselenggaranya kehidupan negara dan menjadi alat rakyat/ masyarakat dalam

mencapai tujuan ideal suatu negara. Untuk melaksanakan fungsi itu, birokrasi pemerintah setidaknya memiliki tiga tugas pokok yakni⁹:

1. Memberikan pelayanan umum (*service*) yang bersifat rutin kepada masyarakat, seperti memberikan pelayanan perijinan, pembuatan dokumen, perlindungan, pemeliharaan fasilitas umum, pemeliharaan kesehatan, dan penyediaan jaminan keamanan bagi penduduk;
2. Melakukan pemberdayaan (*empowerment*) terhadap masyarakat untuk mencapai kemajuan dalam kehidupan yang lebih baik, seperti melakukan pembimbingan, pendampingan, konsultasi, menyediakan modal dan fasilitas usaha, serta melaksanakan pendidikan, dan;
3. Menyelenggarakan pembangunan (*development*) di tengah masyarakat, seperti membangun infrastruktur perhubungan, dan telekomunikasi, perdagangan.

Tahap perkembangan kondisi sosial masyarakat dibagi dalam tiga fase, yakni masyarakat terbelakang (*underdeveloped community*), masyarakat mulai membangun (*developing community*), dan masyarakat maju (*self developed community*). Pemerintah juga mempunyai peran yang berbeda

⁹Budi Setiyono, 2012, *Birokrasi dalam Perspektif Politik dan Administratif*, Bandung: Ujungberung, Hal.20

dalam menghadapi ketiga fase tersebut, berikut ini adalah peran pemerintah dalam tiga fase tersebut¹⁰:

1. Peran Birokrasi dalam Masyarakat Terbelakang

Masyarakat pada fase ini masih membutuhkan dorongan, bimbingan, stimulan, dan contoh dari seseorang atau kelompok di luar mereka. Oleh karena itu, pada masyarakat terbelakang, birokrasi sebagai institusi penyelenggara negara perlu berperan sebagai pemimpin (*leader*) yang menuntun masyarakat untuk maju. Dengan demikian, metode yang cocok untuk dipakai dalam melayani masyarakat ini adalah “pembimbingan masyarakat” (*community guidance*). Prinsip-prinsip dalam metode ini adalah :

Pertama, melakukan manipulasi simbolis terhadap nilai, budaya dan tradisi agar ide-ide pembangunan dapat diterima oleh mereka. Manipulasi simbolis ini merupakan usaha “pengadaptasian” ide/gagasan pembangunan terhadap kondisi masyarakat setempat agar mereka menilai bahwa ide-ide yang ditawarkan birokrasi dianggap “sesuai” dengan tradisi dan budaya mereka. Dengan demikian, masyarakat tidak akan memberikan “perlawanan” terhadap berbagai konsep yang ditawarkan, melainkan mendukung atau setidaknya “tidak menolak”-nya.

¹⁰*Ibid*, Hal. 84-87.

Kedua, melakukan pencerahan dan penyadaran akan nilai-nilai dan gagasan baru agar mereka sedikit demi sedikit mau berubah ke arah yang lebih baik. Hal ini diperlukan karena masyarakat *underdevelopment* masih sepenuhnya pasif dalam mencari informasi. Birokrasi perlu melakukan penyuluhan dan pendampingan supaya masyarakat mengenal ide-ide baru yang dapat membawa mereka pada pencerahan sosial.

Ketiga, birokrasi perlu memberikan subsidi yang besarnya dapat lebih 75% dari nilai suatu proyek/kegiatan, seperti memberikan fasilitas sekolah gratis. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong mereka mengikuti program-program pembangunan berikutnya.

Keempat, melakukan sosialisasi keteladanan, karena masyarakat ini belum tahu sepenuhnya manfaat suatu program pembangunan, maka aparat pemerintah perlu memberikan contoh konkret akan arti penting suatu program.

2. Peran Birokrasi dalam Masyarakat Membangun

Pada masyarakat transisional yang sudah memiliki kecenderungan berkeinginan dalam pembangunan, birokrasi seyogyanya menempatkan diri sebagai organisator (*organizer*). Artinya, birokrasi merupakan pihak yang membangkitkan, mendorong, memfasilitasi, dan mengelola ide-ide dan kegiatan pembangunan di tengah masyarakat. sedangkan metode yang

digunakan adalah “perangsangan” (*community stimulation*), yakni memberikan rangsangan bagi masyarakat untuk maju. Prinsip-prinsip yang dapat digunakan dalam metode ini adalah :

Pertama, melakukan diskursus (dialog) yang menghasilkan kesadaran individu dan kelompok terhadap ide-ide pembangunan. Diharapkan melalui metode ini, masyarakat dapat menganalisa sendiri problem dan kebutuhan mereka untuk kemudian dipecahkan bersama-sama dengan advokasi dan supervisi dari aparat pemerintah.

Kedua, menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan ide dan gagasan dari masyarakat sendiri. Birokrasi harus bisa memfasilitasi, memberikan wadah, dan menyalurkan ide-ide kreatif masyarakat yang berguna bagi pembangunan mereka sendiri. Pada masyarakat jenis ini, sebaiknya birokrasi perlu memberikan keleluasaan agar masyarakat menemukan jati diri dan potensi yang ada pada mereka untuk selanjutnya mereka diberi kesempatan untuk mengembangkan identitas sosialnya.

Ketiga, memberikan subsidi dan fasilitas yang sebaiknya kurang dari 75% dari anggaran pembangunan/pelayanan. Diharapkan masyarakat dalam tahapan ini sudah mulai berpartisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan pembangunan dan pelayanan umum.

Keempat, mulai memberikan penghargaan (*reward*) bagi mereka yang berjasa dan hukuman (*punishment*) bagi mereka yang menyimpang. Kepada orang yang mau berpartisipasi dan berbuat sesuatu untuk kemajuan masyarakatnya, aparatur pemerintah perlu menyediakan tanda jasa. Sebaliknya, bagi mereka yang merusak program pemerintah diberikan sanksi agar mereka jera.

3. Peran Birokrasi dalam Masyarakat Mandiri

Dalam masyarakat yang sudah mandiri, konsentrasi peran birokrasi adalah sebagai fasilitator (*facilitator*) yang mengakomodasikan kebutuhan dan kepentingan warga masyarakat secara baik. Metode yang dapat dipakai dalam peranan ini adalah “memandirikan masyarakat” (*community self help*), yakni prinsipnya sebagian besar urusan diserahkan kepada masyarakat untuk diatur oleh mereka sendiri. Prinsip-prinsip dalam metode ini diantaranya adalah :

Pertama, melakukan fungsi pelayanan secara efektif dan efisien terhadap kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Pelayanan semacam ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang mandiri dalam rangka mencapai tujuan aktivitas-aktivitas mereka. Komunitas masyarakat pengusaha, misalnya, membutuhkan kepastian, ketetapan dan kemudahan dalam mengurus sesuatu yang berkaitan dengan bisnis mereka. Dalam hal inilah birokrasi

pemerintah perlu men-support mereka dengan memberikan jasa pelayanan yang sesuai dengan apa yang mereka inginkan.

Kedua, menyediakan alternatif-alternatif kebijakan yang dapat dipilih oleh masyarakat. Birokrasi harus dapat menawarkan berbagai *policy* yang *flexible* bagi kepentingan masyarakat asalkan tidak bertentangan dengan hukum lainnya.

Ketiga, mengurangi atau bahkan menghapus subsidi. Masyarakat mandiri sudah seharusnya mampu membiayai sendiri semua kebutuhan material mereka, bahkan memberikan bantuan kepada kelompok masyarakat lain yang kekurangan. Birokrasi juga tidak perlu lagi memberikan rangsangan atas suatu program pembangunan, melainkan membuat proposal yang layak (*feasible*) dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat *self development*.

Keempat, *reward dan punishment* dilaksanakan secara tegas dengan prinsip yang egaliter. Yakni adanya prinsip persamaan derajat terhadap semua anggota masyarakat. karena masyarakat jenis ini telah cukup rasional, maka mereka akan cenderung menerima secara proporsional tindakan hukum yang bersendi pada asas keadilan.

1.5.3 Pemberdayaan

1.5.3.1 Pengertian Pemberdayaan

Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya dan menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya. Beberapa ahli mengemukakan definisi pemberdayaan dilihat dari tujuan, proses, dan cara-cara pemberdayaan¹¹:

Menurut Rappaport pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai (atau berkuasa atas) kehidupannya.

Menurut Parsons, et.al pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagi pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.

¹¹Edi Suharto, 2009, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, Bandung: Refika Aditama, Hal. 58-59.

1.5.3.2 Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Prinsip merupakan suatu pernyataan tentang kebijakan yang dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan dan melaksanakan kegiatan secara konsisten. Karena itu, prinsip akan berlaku umum, dapat diterima secara umum, dan telah diyakini kebenarannya dari berbagai pengamatan dalam kondisi yang beragam. Dengan demikian, prinsip dapat dijadikan sebagai landasan pokok yang benar, bagi pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan. Lebih lanjut, Dahama dan Bhatnagar mengungkapkan prinsip-prinsip pemberdayaan mencakup¹² :

1. Minat dan kebutuhan, artinya pemberdayaan akan efektif jika selalu mengacu kepada minat dan kebutuhan masyarakat;
2. Organisasi masyarakat bawah, artinya pemberdayaan akan efektif jika mampu melibatkan/menyentuh organisasi masyarakat bawah, sejak dari setiap keluarga/kekerabatan;
3. Keragaman budaya, artinya pemberdayaan harus memperhatikan adanya keragaman budaya. Perencanaan pemberdayaan harus selalu disesuaikan dengan budaya lokal yang beragam;

¹²Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto, 2015, *Pembangunan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta, Hal. 106-107.

4. Perubahan budaya, artinya setiap kegiatan pemberdayaan akan mengakibatkan perubahan budaya. Kegiatan pemberdayaan harus dilaksanakan dengan bijak dan hati-hati agar perubahan yang terjadi tidak menimbulkan kejutan-kejutan budaya;
5. Kerjasama dan partisipasi, artinya pemberdayaan hanya akan efektif jika mampu menggerakkan partisipasi masyarakat untuk selalu bekerjasama dalam melaksanakan program-program pemberdayaan yang telah dirancang;
6. Demokrasi dalam penerapan ilmu, artinya dalam pemberdayaan harus selalu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menawar setiap ilmu alternatif yang ingin diterapkan. Yang dimaksud demokrasi di sini, bukan terbatas pada tawar menawar tentang ilmu alternatif saja, tetapi juga dalam penggunaan metoda pemberdayaan, serta pengambilan keputusan yang akan dilakukan oleh masyarakat sarannya;
7. Belajar sambil bekerja, artinya dalam kegiatan pemberdayaan harus diupayakan agar masyarakat dapat “belajar sambil bekerja” atau belajar dari pengalaman tentang segala sesuatu yang ia kerjakan;
8. Penggunaan metoda yang sesuai, artinya pemberdayaan harus dilakukan dengan penerapan metoda yang selalu disesuaikan dengan kondisi

(lingkungan fisik, kemampuan ekonomi dan nilai sosial budaya) sasarannya;

9. Kepemimpinan, artinya penyuluh tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang hanya bertujuan untuk kepentingan/kepuasannya sendiri, dan harus mampu mengembangkan kepemimpinan;
10. Spesialis yang terlatih, penyuluh harus benar-benar pribadi yang telah memperoleh latihan khusus tentang segala sesuatu yang sesuai dengan fungsinya sebagai penyuluh;
11. Segenap keluarga, artinya penyuluh harus memperhatikan keluarga sebagai satu kesatuan dari unit sosial;
12. Kepuasan, artinya pemberdayaan harus mampu mewujudkan tercapainya kepuasan. Adanya kepuasan akan sangat menentukan keikutsertaan sasaran pada program-program pemberdayaan selanjutnya.

1.5.3.3 Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat

Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subjek dari upaya pembangunannya sendiri. Berdasarkan konsep

demikian, maka pemberdayaan masyarakat harus mengikuti pendekatan sebagai berikut¹³ :

Pertama, upaya itu harus terarah (*targeted*). Ini yang secara populer disebut pemihakan, yang ditujukan langsung kepada yang memerlukan, dengan program yang dirancang untuk mengatasi masalahnya dan sesuai kebutuhannya.

Kedua, pemberdayaan harus langsung mengikutsertakan atau bahkan dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi penerima manfaatnya. Mengikutsertakan masyarakat yang akan menerima manfaat, mempunyai beberapa tujuan, yakni supaya bantuan tersebut efektif karena sesuai dengan kehendak dan kemampuan serta kebutuhan mereka. Selain itu sekaligus meningkatkan keberdayaan (*empowering*) masyarakat dengan pengalaman dalam merancang, melaksanakan, mengelola, dan mempertanggungjawabkan upaya peningkatan diri dan ekonominya.

Ketiga, menggunakan pendekatan kelompok, karena secara sendiri-sendiri masyarakat miskin sulit dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya, juga lingkup bantuan menjadi terlalu luas kalau penanganannya dilakukan secara individu, karena itu pendekatan kelompok adalah pendekatan yang paling efektif dan dilihat dari penggunaan sumber daya juga lebih efisien. Di samping itu kemitraan usaha antara kelompok tersebut dengan

¹³*Ibid*, Hal. 163.

kelompok yang lebih maju harus terus menerus di bina dan dipelihara agar saling menguntungkan dan memajukan.

1.5.3.4 Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah suatu kegiatan yang memiliki tujuan yang jelas dan harus dicapai, oleh sebab itu, setiap pelaksanaan pemberdayaan masyarakat perlu dilandasi dengan strategi kerja tertentu demi keberhasilannya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam pengertian sehari-hari, strategi sering diartikan sebagai langkah-langkah atau tindakan tertentu yang dilaksanakan demi tercapainya suatu tujuan atau penerima manfaat yang dikehendaki.

Strategi pemberdayaan masyarakat pada dasarnya mempunyai tiga arah yaitu : pertama, pemihakan dan pemberdayaan masyarakat; kedua, pemantapan otonomi dan pendelegasian wewenang dalam pengelolaan pembangunan yang mengembangkan peran serta masyarakat; ketiga, modernisasi melalui penajaman arah perubahan struktur sosial ekonomi (termasuk didalamnya kesehatan), budaya dan politik yang bersumber dari masyarakat.

Menurut Ismawan menetapkan adanya lima program strategi pemberdayaan yang terdiri dari¹⁴ :

1. pengembangan sumber daya manusia;
2. pengembangan kelembagaan kelompok;
3. pemupukan modal masyarakat (swasta)
4. pengembangan usaha produktif;
5. penyediaan informasi tepat guna.

1.5.3.5 Indikator Keberdayaan Masyarakat

Untuk mengetahui fokus dan tujuan pemberdayaan, maka perlu diketahui berbagai indikator yang dapat menunjukkan seseorang itu berdaya atau tidak. Lebih lanjut, Mardikanto mengemukakan beberapa indikator keberhasilan yang dipakai untuk mengukur pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat mencakup¹⁵ :

1. Jumlah warga yang secara nyata tertarik untuk hadir dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan;
2. Frekuensi kehadiran tiap-tiap warga pada pelaksanaan tiap jenis kegiatan;
3. Tingkat kemudahan penyelenggaraan program untuk memperoleh pertimbangan atau persetujuan warga atas ide baru yang dikemukakan;

¹⁴*Ibid*, Hal. 170.

¹⁵*Ibid*, Hal 291-292.

4. Jumlah dan jenis ide yang dikemukakan oleh masyarakat yang ditujukan untuk kelancaran pelaksanaan program pengendalian;
5. Jumlah dana yang dapat digali dari masyarakat untuk menunjang pelaksanaan program kegiatan;
6. Intensitas kegiatan petugas dalam pengendalian masalah;
7. Meningkatkan kapasitas skala partisipasi masyarakat dalam bidang kesehatan;
8. Berkurangnya masyarakat yang menderita sakit malaria;
9. Meningkatnya kepedulian dan respon terhadap perlunya peningkatan kehidupan kesehatan;
10. Meningkatnya kemandirian kesehatan masyarakat.

Lima indikator pokok keberhasilan dalam pemberdayaan yang dilakukan pemerintah maupun swasta yaitu¹⁶ :

1. Bantuan dana sebagai modal usaha;
2. Pembangunan prasarana sebagai pendukung pengembangan kegiatan sosial ekonomi rakyat;
3. Penyediaan sarana untuk memperlancar pemasaran hasil produksi barang dan jasa masyarakat;
4. Pelatihan bagi sosial ekonomi masyarakat;
5. Penguatan kelembagaan kepada masyarakat

¹⁶Sunyoto Usman, 2004, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

1.5.3.6 Tahapan Proses Pemberdayaan

Menurut Wrihantolo, pemberdayaan adalah sebuah proses menjadi, bukan sebuah proses instan. Sebagai proses, pemberdayaan mempunyai tiga tahapan yaitu :¹⁷

Tahap pertama adalah penyadaran. Pada tahap ini, target yang hendak diberdayakan diberi pencerahan dalam bentuk pemberian penyadaran bahwa mereka mempunyai hak untuk mempunyai sesuatu. Misalnya, target adalah kelompok masyarakat miskin, kepada mereka diberikan pemahaman bahwa mereka dapat menjadi berada, dan itu dapat dilakukan jika mereka mempunyai kapasitas untuk keluar dari kemiskinannya. Program-program yang dapat dilakukan pada tahap ini misalnya, memberikan pengetahuan yang bersifat *kognisi* dan *belief*. Prinsip dasarnya adalah membuat target mengerti bahwa mereka perlu membangun (diberdayakan), dan proses pemberdayaan itu dimulai dari dalam diri mereka.

Tahap kedua adalah pengkapasitasan. Inilah yang sering kita sebut *capacity building*, atau dalam bahasa yang lebih sederhana memampukan. Untuk diberikan daya atau kuasa, yang bersangkutan harus mampu terlebih dahulu. Misalnya, sebelum memberikan otonomi daerah, seharusnya daerah-daerah yang diotonomkan diberi program pemampuan atau *capacity building* untuk membuat mereka cakap dalam

¹⁷ Randy Wrihatnolo dan Riant Nugroho Dwidjowito, 2007, *Manajemen Pemberdayaan : Sebuah Pengantar dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, Hal. 3-6.

mengelola otonom yang diberikan. Proses *capacity building* terdiri atas tiga jenis yaitu manusia, organisasi dan sistem nilai.

Tahap ketiga itu adalah pemberian daya itu sendiri atau empowerment. Pada tahap ini kepada target diberikan daya, kekuasaan, otoritas, atau peluang. Pemberian ini sesuai dengan kualitas kecakapan yang telah dimiliki. Prosedur pada tahap ketiga ini cukup sederhana, namun kita seringkali tidak cakup menjalankannya karena mengabaikan bahwa proses pemberian daya atau kekuasaan diberikan sesuai dengan kecakapan penerima.

1.5.4 Usaha Mikro Kecil dan Menengah

1.5.4.1 Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Ekonomi rakyat adalah sektor-sektor ekonomi yang dihuni oleh pelaku ekonomi yang berukuran kecil, yang keadaannya serba terbelakang. Sektor-sektor ini yang sekarang populer dengan istilah UMKM atau Usaha Mikro Kecil dan Menengah. UMKM ini meliputi sektor pertanian rakyat, sektor perikanan rakyat, sektor transportasi rakyat, sub-sektor industri kecil dan rumah tangga, termasuk perkreditan rakyat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) ada beberapa kriteria yang dipergunakan untuk mendefinisikan pengertian dan kriteria UMKM sebagai berikut :

a. Usaha Mikro

Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/ badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Kriteria usaha mikro adalah sebagai berikut : Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)

b. Usaha Kecil

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut : Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta

rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah).

c. Usaha Menengah

Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Kriteria usaha menengah adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah).

Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah menurut UU ini digolongkan berdasarkan jumlah asset dan omset yang dimiliki oleh sebuah usaha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 1.3
Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah

No.	Usaha	Kriteria	
		Aset	Omset
1.	Usaha Mikro	Maks. 50 Juta	Maks. 300 Juta
2.	Usaha Kecil	>50 Juta – 500 Juta	>300 Juta – 2,5 Miliar
3	Usaha Menengah	>500 Juta – 10 Miliar	>2,5 Miliar – 50 Miliar

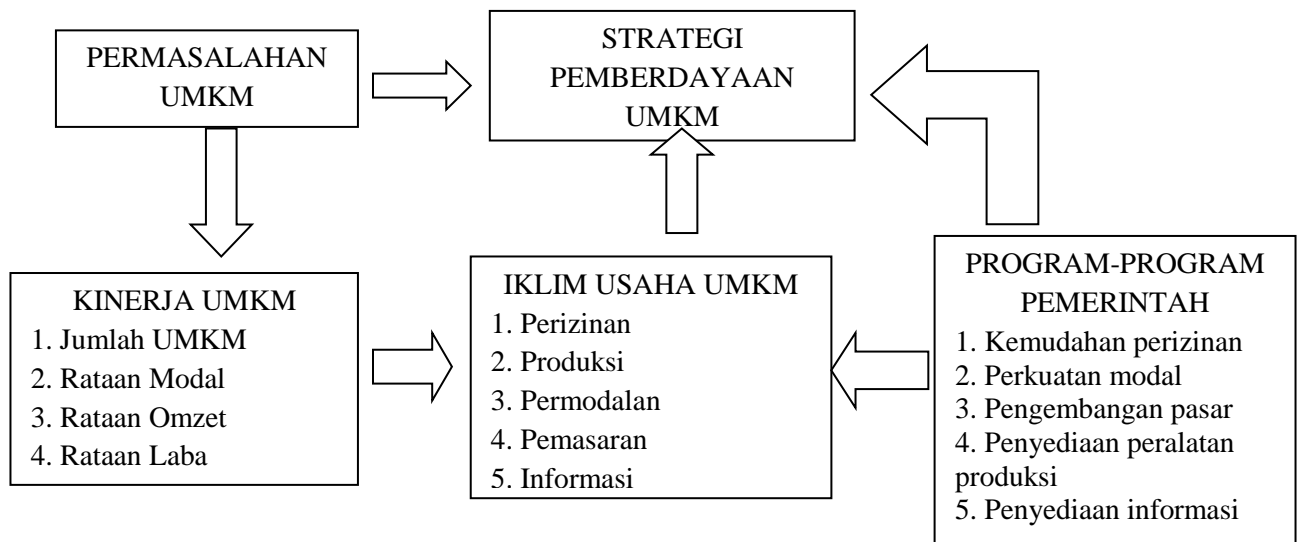
Sumber : UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM

1.5.4.2 Strategi Pemberdayaan UMKM

Pemberdayaan UMKM merupakan pekerjaan yang sangat besar dan rumit, oleh sebab itu apa-apa yang dilakukan pemerintah melalui pelaksanaan berbagai program langsung adalah bersifat stimulan untuk mendorong UMKM agar secara mandiri dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi. Dari masalah pokok yang dihadapi UMKM juga tidak mungkin semuanya dimasuki oleh pemerintah, karena pemerintah sebagai unsur penyeimbang hanya mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang pada hakikatnya dapat mendorong pemanfaatan sumberdaya pembangunan secara optimal. Banyak hal yang menjadi kendala dalam pemberdayaan UMKM, tetapi berada di luar jangkauan kewenangan pemerintah, atau pemerintah juga perlu mempertimbangkan unsur-unsur lainnya dalam mengeluarkan kebijakan untuk mendorong UMKM dari aspek tersebut. Sejalan dengan uraian diatas

dapat dikemukakan konsepsi strategi pemberdayaan UMKM untuk mengantisipasi iklim usaha yang tidak kondusif seperti bagan di bawah ini¹⁸ :

Gambar 1.1
Strategi Pemberdayaan UMKM



Sumber: Mukti Fajar, *UMKM di Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi*, 2016.

1.6 Kerangka Berpikir

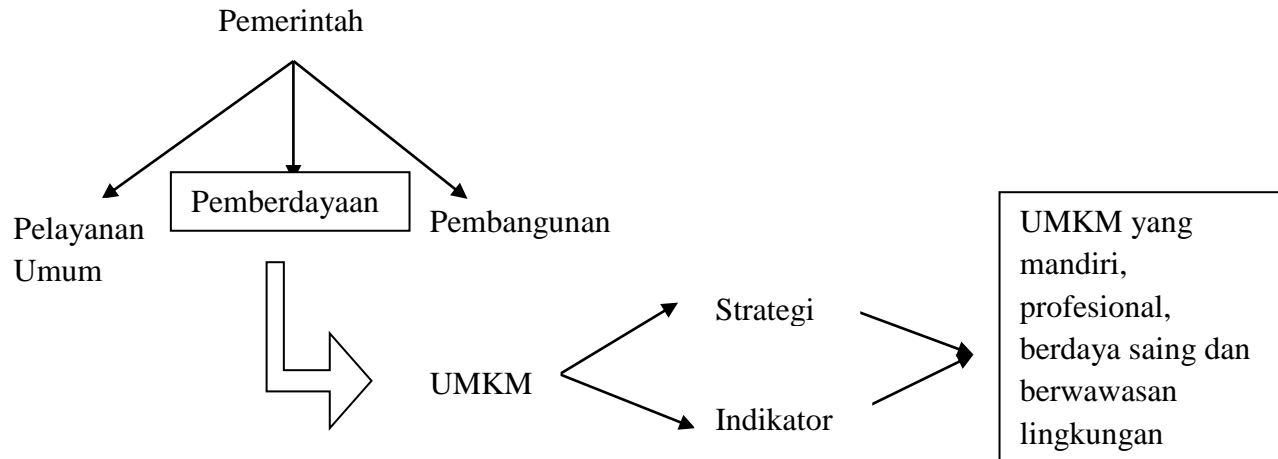
Dalam penelitian ini, peneliti mencoba meneliti mengenai peran pemerintah dalam pemberdayaan UMKM di Desa Loram Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus. Peran birokrasi pemerintah pada suatu negara ada tiga, yaitu yang pertama, memberikan pelayanan umum kepada masyarakat; kedua, melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat untuk mencapai kemajuan dalam kehidupan yang lebih baik dan; ketiga menyelenggarakan pembangunan ditengah masyarakat. Salah satu fungsi pemerintah yaitu pemberdayaan, upaya pemberdayaan pemerintah ini dapat

¹⁸Mukti Fajar, *Op.Cit*, Hal. 220.

dilakukan melalui pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Perlunya upaya pemberdayaan pada sektor UMKM ini dikarenakan sektor ini mempunyai peranan yang cukup besar dalam kegiatan perekonomian nasional.

Untuk melakukan pemberdayaan UMKM ini pemerintah perlu menerapkan beberapa strategi seperti kemudahan perizinan, perkuatan modal, pengembangan pasar, penyediaan peralatan produksi dan penyediaan strategi. Dengan diterapkannya beberapa strategi pemerintah, suatu strategi pemberdayaan dapat dikatakan berhasil jika memenuhi lima indikator yaitu bantuan dana sebagai modal usaha; pembangunan prasarana sebagai pendukung pengembangan kegiatan sosial ekonomi rakyat; penyediaan sarana untuk memperlancar pemasaran hasil produksi barang dan jasa masyarakat; pelatihan bagi sosial ekonomi masyarakat; dan penguatan kelembagaan kepada masyarakat. Apabila pemerintah telah menerapkan strategi pemberdayaan dan strategi tersebut dinilai berhasil dengan diukur melalui indikator tersebut maka diharapkan akan terwujud Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang mandiri, profesional, berdaya saing dan berwawasan lingkungan. Berikut ini adalah gambaran dari kerangka berpikir dalam penelitian ini.

Bagan 1.2
Kerangka Berpikir



Sumber: Diolah dari Berbagai Sumber

Fungsi birokrasi dalam suatu negara adalah menjamin terselenggaranya kehidupan negara untuk mencapai tujuannya. Sedangkan peran birokrasi pemerintah dalam kehidupan di suatu negara adalah memberikan pelayanan umum kepada masyarakat, melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat untuk mencapai kemajuan dalam kehidupan yang lebih baik dan menyelenggarakan pembangunan di tengah masyarakat.

Pemberdayaan adalah suatu proses untuk memperkuat atau keberdayaan kelompok dalam suatu masyarakat yang bertujuan untuk mencapai kehidupan yang layak. Sedangkan menurut Parsons pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagi pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh

keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya. Suatu pemberdayaan dapat dikatakan berhasil apa bila memenuhi berbagai indikator yaitu bantuan dana sebagai modal usaha; pembangunan prasarana sebagai pendukung pengembangan kegiatan ekonomi rakyat; penyediaan sarana untuk memperlancar pemasaran hasil produksi barang dan jasa masyarakat; pelatihan bagi sosial ekonomi masyarakat; dan penguatan kelembagaan pada masyarakat.

Sedangkan menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Usaha mikro kecil dan menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan dengan kriteria yang sudah diatur. Melihat peran UMKM yang cukup berpengaruh dalam pembangunan ekonomi maka diperlukan strategi untuk pemberdayaan UMKM tersebut agar terwujud UMKM yang mandiri, profesional, berdaya saing dan berwawasan tinggi.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Desain Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan penjabaran deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran untuk memahami dan menjelaskan peran pemerintah dalam pemberdayaan UMKM di Desa Loram Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus. Menurut Bogdan dan Taylor metodologi kualitatif sebagai

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹⁹ Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan. Pemahaman tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu, tetapi didapat setelah melakukan analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus penelitian. Berdasarkan analisis tersebut kemudian ditarik kesimpulan berupa pemahaman umum yang sifatnya abstrak tentang kenyataan-kenyataan.

1.8.2 Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. Lokasi ini bisa di wilayah tertentu atau suatu lembaga tertentu dalam masyarakat untuk memperoleh data primer, lokasi penelitian dilakukan di Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kudus.

Situs penelitian adalah suatu tempat dimana peneliti menangkap keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti untuk memperoleh data atau

¹⁹Lexy J. Moeleong, 2008, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, Hal. 38.

informasi yang diperlukan. Sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan maka penetapan situs penelitian adalah Desa Loram Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus.

1.8.3 Jenis Data

Menurut Lofland dan Lofland sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan hal itu, pada bagian ini jenis datanya dibagi ke dalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto dan statistik.²⁰

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh tidak langsung dari sumbernya.

1.8.4 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder :

²⁰*Ibid*, Hal. 157.

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber asalnya atau di lapangan yang merupakan data empirik. Data empirik yang dimaksud adalah hasil wawancara dengan beberapa pihak atau informan yang benar-benar berkompeten dan bersedia memberikan data dan informasi yang dibutuhkan dan relevan dengan kebutuhan penelitian. Dalam penelitian ini, informan yang digunakan dalam data primer adalah Kepala Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; Kepala Seksi Pengembangan, Promosi, Produksi dan Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah; Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Teknologi Usaha Kecil dan Menengah, Kepala Desa Loram Kulon, Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan masyarakat Desa Loram Kulon yang memiliki usaha mikro kecil dan menengah sentra tas.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil telaah bacaan ataupun kajian pustaka, buku-buku atau literatur yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti, internet, jurnal, dan dokumen atau arsip.

1.8.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan menggunakan teknik kondisi yang alami, sumber data primer, dan lebih banyak pada teknik observasi berperan serta, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Catherine Marshall, Gretchen yang dikutip oleh Sugiyono, menyatakan bahwa: “... *the fundamental methods relied on by qualitative researchers for gathering information are, participation in the setting, direct observation, indepth interviewing, document review.*”²¹

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Berikut ini adalah penjabaran dari tiap-tiap teknik pengumpulan data :

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) sebagai pengaju/ pemberi pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu. Maksud diadakannya wawancara seperti ini ditegaskan oleh Lincoln dan Guba antara lain : mengonstruksi perihal orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, dan kepedulian, merekonstruksi kebulatan-kebulatan harapan pada masa yang akan mendatang;

²¹M. Junaidi Ghony & Fauzan, 2016, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, Hal. 164.

memverifikasi, mengubah dan memperluas informasi dari orang lain baik manusia maupun bukan manusia (triangulasi); dan memverifikasi, mengubah, dan memperluas konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan anggota.²²

Esterberg mengemukakan beberapa macam wawancara yaitu²³ :

1. Wawancara Terstruktur (*Structured Interview*)

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Wawancara terstruktur menggunakan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan.

2. Wawancara Semiterstruktur (*Semistruktur Interview*)

Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori *in-dept interview*, di mana pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur.

²²Basrowi dan Suwandi, 2008, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, Hal. 127.

²³Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, Hal. 233-234.

3. Wawancara tak berstruktur (*Unstructured Interview*)

Wawancara tidak berstruktur adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semiterstruktur dimana tujuan dari wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya. Informan dalam wawancara ini adalah : Kepala Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; Kepala Seksi Pengembangan, Promosi, Produksi dan Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah; Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Teknologi Usaha Kecil dan Menengah, Kepala Desa Loram Kulon, Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan masyarakat Desa Loram Kulon yang memiliki usaha mikro kecil dan menengah sentra tas.

2. Observasi

Observasi yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung terhadap objek penelitian yang dilakukan dengan sistematis dan

sengaja. Beberapa bentuk observasi yang dapat digunakan dalam penelitian kualitatif adalah sebagai berikut:²⁴

1. Observasi Partisipasi (*Participant Observer*)

Observasi partisipasi adalah pengumpulan data melalui observasi pengamatan dengan langsung hidup bersama, merasakan serta berada dalam aktivitas kehidupan objek pengamatan.

2. Observasi Tidak Berstruktur

Observasi tidak berstruktur merupakan observasi yang dilakukan tanpa menggunakan *guide observasi*. Dengan demikian, pada observasi ini pengamat harus mampu secara pribadi mengembangkan daya pengamatannya dalam mengamati suatu objek.

3. Observasi Kelompok

Bentuk observasi lain yang sering digunakan adalah observasi kelompok. Observasi ini dilakukan secara berkelompok terhadap suatu atau beberapa objek sekaligus.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik observasi tidak berstruktur tanpa menggunakan *guide observasi*. Jadi, dalam

²⁴Burhan Bungin, 2010, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, Hal. 115-117.

penelitian ini peneliti harus mampu mengembangkan pengamatannya dalam suatu objek.

3. Dokumentasi

Data dalam penelitian kualitatif pada umumnya diperoleh dari sumber manusia atau *human resources* melalui observasi dan wawancara. Di samping itu, ada pula sumber bukan manusia atau *nonhuman resources*, antara lain berupa dokumen, foto dan bahan statistik. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber dokumen resmi, buku, jurnal, foto serta sumber internet.

1.8.6 Analisis dan Interpretasi Data

Pada prinsipnya analisis data kualitatif dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Teknik analisis yang dilakukan dengan menggunakan teknik analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman mencakup tiga kegiatan yang bersamaan²⁵ :

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstraksian dan pentransformasian data kasar dari lapangan. Proses ini berlangsung selama penelitian dilakukan, dari awal sampai akhir

²⁵Basrowi dan Suwandi, *Op.Cit*, Hal. 209-210.

penelitian. Reduksi merupakan bagian dari analisis, bukan terpisah. Fungsinya untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi sehingga interpretasi bisa ditarik.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajiannya antara lain berupa teks naratif, matriks, grafik, jaringan dan bagan. Dalam tahap ini peneliti juga melakukan *display* (penyajian) data secara sistematis, agar lebih mudah untuk dipahami interaksi antar bagian-bagiannya dalam konteks yang utuh bukan segmental atau fragmental terlepas satu dengan lainnya. Dalam proses ini, data diklasifikasikan berdasarkan tema-tema inti.

c. Menarik Kesimpulan atau Verifikasi

Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Makna-makna yang muncul dari data harus selalu diuji kebenaran dan kesesuaiannya sehingga validitasnya terjamin.

1.8.7 Kualitatif Data

Uji keabsahan dapat dilakukan dengan triangulasi pendekatan dengan kemungkinan melakukan terobosan metodologis terhadap masalah-masalah tertentu yang kemungkinan dapat dilakukan. Triangulasi dapat dilakukan dengan cara²⁶ :

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara;
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi;
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang-orang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada dan orang pemerintahan;
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

²⁶Djunaidi Ghony dan Fauzan Almansur, *Op.Cit*, Hal. 322.